

Bupati Hulu Sungai Selatan Serahkan Dana Hibah Sebesar Rp 5,2 Miliar untuk Organisasi Keagamaan



Sumber gambar:

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Bupati-hss-serahkan-dana-hibah.jpg>

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab HSS, H Fajar Abdi, total dana hibah yang diserahkan untuk tahun anggaran 2022 ini sebesar Rp 5,2 miliar. Rinciannya, tiga lembaga organisasi keagamaan, enam masjid, 12 langgar atau musholla, empat pondok pesantren dan satu majelis taklim. Dikatakannya, dana hibah ini diserahkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan.

Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), Drs H Achmad Fikry, menyerahkan dana hibah kepada organisasi keagamaan, pondok pesantren, majelis talim, mesjid dan langgar atau mushalla, Rabu (13/4/2022).

Terutama untuk peningkatan kualitas dan sarana prasarana tempat ibadah di HSS. Sehingga tercipta kenyamanan beribadah dan menuntut ilmu bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat HSS yang agamis.

Bupati HSS, Drs H Achmad Fikry mengatakan, dana hibah yang diserahkan hari ini mungkin belum sesuai dengan harapan atau keperluan lembaga, mesjid dan penerima hibah lainnya. Namun ini sudah di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Bantuan ini, sifatnya hanya untuk memancing swadaya masyarakat. Dengan sumbangan di jalan untuk mengumpulkan dana atau dengan cara lainnya. Karena pemerintah tidak bisa membantu keseluruhan kebutuhan yang di perlukan.

Ia juga menyatakan pemerintah daerah akan terus membantu kegiatan di pondok pesantren, masjid dan langgar. Termasuk melanjutkan program pembayaran tagihan listrik untuk semua langgar atau musala. Ia berharap, penerima segera melaksanakan dan menggunakan dana hibah yang diberikan sesuai kebutuhannya. “Yang harus diingat pula agar secepatnya memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan standar laporan yang ada di pemerintah HSS,” jelasnya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Selaras dengan visi-misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang cerdas, inovatif, teknologi, dan agamis untuk kesejahteraan dunia dan akhirat, Bupati HSS H. Achmad Fikry menyerahkan dana hibah bidang keagamaan untuk organisasi keagamaan di pendopo bupati setempat.

Adapun total dana hibah yang disalurkan berjumlah Rp5,2 miliar, dengan rincian penerima hibah 12 organisasi keagamaan, 6 mesjid, 12 langgar atau mushala, pondok pesantren sebanyak empat, serta 1 majelis ta'lim. "Penyaluran dana hibah tahun ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah HSS, terhadap pelaksanaan pembangunan di bidang keagamaan," kata Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Sekretariat Daerah (Setda) HSS, H. Fajar Abdi, Rabu (13/4).

Serta untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah di Kabupaten HSS, sehingga terciptanya kenyamanan beribadah dan menuntut ilmu bagi masyarakat, yang pada akhirnya dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten HSS yang agamis. "Saya ucapkan selamat kepada para penerima dana hibah, semoga dana yang diterima dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku," kata Bupati HSS H Achmad Fikry, yang juga berterimakasih kepada para hadirin yang bersedia rutin menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.

Ia berharap hibah ini mampu menjadi salah satu bentuk kepedulian dari pemerintah daerah, serta sebagai upaya menunjang kegiatan keagamaan. Dia berpesan agar kiranya nuansa agamis yang menjadi ciri masyarakat dapat terus dipelihara bersama, dengan kegiatan majelis ta'lim dan tempat ibadah hendaknya tetap berjalan dengan protokol kesehatan.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/13/bupati-hss-serahkan-dana-hibah-sebesar-rp-52-miliar-untuk-organisasi-keagamaan>, Bupati HSS Serahkan Dana Hibah Sebesar Rp 52 Miliar untuk Organisasi Keagamaan, (13/04/22)
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/322673/pemkab-hss-salurkan-dana-hibah-bidang-keagamaan-rp52-miliar>, Pemkab HSS Salurkan Dana Hibah Bidang Keagamaan Rp 52 Miliar, (13/04/22)

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah

dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.

- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
 - 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c) *Huruf (c)* memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf (f)* Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka 6)* Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. *Huruf a)* peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf b)* bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf c)* tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) *Angka (1)* kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) *Angka (2)* badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) *Angka (3)* partai politik dan/atau
- 4) *Angka (4)* ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf d)* memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf e)* memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka 7)* Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka 8)* Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka 9)* Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.